

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

2.1.1 VISI DAN MISI

VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat terus eksis, antisipatif, kreatif, dan inovatif. Visi adalah juga suatu gambaran yang menantang keadaan di masa datang yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan demikian dalam merencanakan program kerja dan merencanakan visi misinya lembaga ini berpedoman dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yaitu **“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Bermanfaat Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan ”**.

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi secara sederhana menjadi sebuah konsep ideal Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sejahtera yang berarti suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang merasa aman, damai dan tentram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kehidupan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri dan lingkungan dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi Sosial – Budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian Misi Kedua : “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal berbasis gender, Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan dengan sasaran adalah meratanya pendapatan masyarakat.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan misi serta meletakkan kerangka prioritas memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang dicanangkan untuk jangka 5 (Lima) tahun ke depan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya yang diwujudkan atau dihasilkan dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (Das Salen) dan Kenyataan (Das Seen) pada kurun waktu tertentu.

Penetapan tujuan sebagai penjabaran dari pelaksanaan Visi dan Misi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan tujuan yang merupakan kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan dalam kurun waktu 3 (Tiga) sampai 5 (Lima) tahun yang akan datang
2. Penetapan indikator tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut

Dari tahapan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menetapkan tujuan sebagai arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dalam Pembangunan.

Sasaran yang ingin di capai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender
- b. Tersedianya system data pilah Gender pada anak OPD yang berkualitas
- c. Meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan dalam pembangunan.

2. Meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
 Sasaran yang ingin di capai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan lembaga layanan dan perlindungan korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus ..
 - b. Meningkatkan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana
 Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :
 - a. Keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif
 - b. Tersedianya data dan informasi program kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga yang akurat dan tepat waktu.
 - c. Tersedianya jaringan kemitraan dan sarana advokasi dan KIE.
 - d. Meningkatkan peran petugas PKB/PLKB dan Kader KB.
 - e. Menurunnya akseptor KB non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang)
 - f. Terbangunnya ketahanan keluarga remaja dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
 - g. Terwujudnya pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 - h. Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia.

2.1.3 KEBIJAKAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada DPPKBP3A Kabupaten Berau melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (PPRG).
2. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di Daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
3. Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkait dengan isu gender dan anak.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia

- usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan focus pada UMKM perempuan.
 7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dalam kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat dan modal.
 9. Memperkuat mekanisme kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 10. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
 11. Penguatan Kelembagaan P2TP2A
 12. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE.
 13. Pemenuhan hak anak dengan focus pada percepatan pencapaian Kabupaten / Kota Layak Anak.
 14. Pemenuhan hak anak dengan focus dan peduli dengan forum anak dan forum peduli anak berkebutuhan khusus (ABK).
 15. Upaya fasilitasi pengumpulan data anak.
 16. Menyusun, mereview, mengoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
 17. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pemenuhan hak anak di daerah
 18. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
 19. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan khusus anak.
 20. Memperkuat lembaga / jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak
 21. Memperkuat sistem penyediaan, pemuktahiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak

- anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan / program / kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
22. Memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak.
 23. Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
 24. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan.
 25. Menyusun profil melalui pengumpulan data anak dari tingkat kecamatan.
 26. Memperkuat Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah.
 27. Peningkatan standar kualitas pelayanan tenaga medis
 28. KIE dan Advokasi tentang keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR)
 29. Pelatihan Updating pendataan keluarga
 30. Refreshing capor (pencatatan dan pelaporan) bulanan
 31. Pembentukan Kampung KB
 32. Peningkatan kualitas PKB/PLKB dan kader KB melalui bimtek dan pelatihan melalui BKKBN
 33. KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untuk menurunkan akseptor KB non MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang)
 34. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga
 35. Pengembangan / Revitalisasi Peran, fungsi dan pengelolaan PIK remaja dan BKR.
 36. Peningkatan Fasilitasi pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR.
 37. Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta penguatan 8 fungsi keluarga.
 38. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 39. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
 40. Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

Strategi

Pencapaian maupun perwujudan dari Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2016-2021 akan ditempuh strategi sebagai

berikut :

Strategi Dasar dan Strategi Operasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsip gender (PPRG) serta pendampingan implementasi PPRG.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan DPPKBP3A Kabupaten Berau
3. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak anak
4. Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan 1 yaitu " Meningkatkan Intensitas Kesetaraan Gender , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan.
- 2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
- 3) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- 5) Advokasi dan Fasilitasi Permasalahan Anak.
- 6) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- 7) Kegiatan Fasilitasi Pusat Layanan Autis
- 8) Fasilitasi Penguatan kelembagaan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berbasis hak Anak.
- 9) Peningkatan Pengembangan Kabupaten/Kota /Kecamatan/Kampung Layak Anak.
- 10) Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan Pukesmas ramah Anak.
- 11) Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
- 12) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Peduli Anak dan Forum Peduli ABK.
- 13) Expose Peningkatan Kreatifitas Anak dalam Pembangunan.
- 14) Pelatihan Tenaga Pendamping ABK dan Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh kembang Anak.

15) Pendataan dan Pengolahan data Profil Anak/Organisasi serta Potensi Anak.

Tujuan 2 “Meningkatnya Efektivitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan”. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- 2) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga kerja Perempuan.
- 3) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan.
- 4) Melaksanakan Koordinasi dengan lintas OPD untuk mencegah Trafficking dan KDRT.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan :

- 1) Pembinaan Organisasi Perempuan.
- 2) Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Pengelolaan Usaha.
- 3) Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan.
- 4) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Pembentukan Desa Prima.
- 6) Pembinaan dan Evaluasi Model Desa prima.
- 7) Peningkatan Motivasi Perempuan Lansia dalam Pembangunan.

Tujuan 3 “Meningkatkan Akses Layanan Keluarga Berencana”. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Keluarga Berencana.

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Pelayanan Kontrasepsi KB dan Alat Kontrasepsi.
- 2) Pembinaan Klinik KB.
- 3) Sosialisasi Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB. Dr. Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta.
- 4) Pendampingan DAK - BOK.
- 5) Penyusunan Data Informasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- 6) Penyediaan Data Base Informasi Penduduk dan Keluarga Berencana Berbasis IT
- 7) Penyediaan Sarana, Alat dan Kelengkapan Kerja Tenaga (PKB/PLKB) dan Kader KB.
- 8) Advokasi dan Pendampingan Peserta Program KB
- 9) Peningkatan Promosi dan Pergerakan Masyarakat.
- 10) Penyuluhan KB dan Penguatan Kelembagaan Kader KB.

11) Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengendalian Penduduk.

12) Peningkatan Kapasitas Tenaga PKB/PLKB dan Kader KB.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kegiatan :

1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

2) Pembinaan PIK Remaja dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Program Pelayanan Kontrasepsi.

Kegiatan :

1) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi.

Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Kegiatan

1) Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS.

2) Pembinaan dan Penilaian Keluarga Harmonis dalam Membangun Keluarga harmonis.

3) Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB, BKR dan BKL.

4) Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga .

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan perlindungan Anak Kabupaten Berau telah membuat Rencana Kerja Tahunan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target yang akan di capai sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya Lembaga Layanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Implementasi Kabupaten / Kota Layak Anak
4. Keikut Sertaan PUS menjadi peserta KB Aktif

B. Indikator Kinerja Utama

1. Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG
2. Presentase Penagnan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak
3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)
4. Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CP R)

Guna penyempurnaan dalam Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan adanya Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 – 2021 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 -2021 maka Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dilakukan Review / Revisi IKU 2017 -2021. Oleh karena itu Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama mengukur keberhasilannya. Perencanaan Kinerja digunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah dilakukan Review. Yang diambil sebagai Indikator Kinerja Utama adalah yang ditetapkan sebagai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Berau sebagai dasar evaluasi kinerja, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja DPPKBP3A Kabupaten Berau yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DPPKBP3A Kabupaten Berau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TAHUN 2017 – 2021

Tujuan ke 16 RPJMD
Sasaran 16 RPJMD

Meningkatnya Kualitas SDM
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TH 2016)	Target Kinerja Program Pertahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%		74,75	75,66	75,84	76,03	76,95	76,95
	Cakupan Unmet Need	%		18	15	13	10	9	9
2.	Persentase penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	%		100	100	100	100	100	100

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kerja tahunan 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki . 8 (delapan) Program Kerja dan 36 (tiga puluh enam) sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Dinas	Prosentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang terselesaikan	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	Rp. 1.359.376.300,-
		Jumlah Benda Pos yang tersedia	600 Lembar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.400.000,-
		Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 130.705.800,-
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Mobil dan Motor setiap bulan	480 UB	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 209.217.500,-
		Jumlah Orang Bulan Tenaga Administrasi Keuangan	185 OB	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 116.193.000,-
		Jumlah Alat dan Bahan Pembersih	410 Buah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 18.000.000,-
		Jumlah Peralatan Kerja Yang di Perbaiki	46 Unit	Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	Rp. 37.145.000,-
		Jumlah Jenis ATK yang Tersedia	600 Jenis	Penyediaan ATK	Rp. 21.000.000,-
		Jumlah Foto Copy, Jilid dan Cetak	35.000 Lbr	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 26.201.000,-
		Jenis Komponen Listrik Yang	120 Buah	Penyediaan Komponen Instalasi	

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Tersedia		Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.149.000,-
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 13.965.000,-
		Tersedianya Peratan Rumah Tangga	20 Jenis	Penyediaan Peralatan Rumag Tangga	Rp. 12.250.000,-
		Jumlah Berlangganan Koran	1.080 Eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 7.500.000,-
		Jumlah Kali Makan dan Minum untuk TRapat dan Tamu	25 kali Rapat	Penyediaan Makan dan Minum	Rp. 84.500.000,-
		Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	20 Kali	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp. 165.000.000,-
		Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	140 Kali	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp. 55.000.000,-
2	Meningkatnya Kualitas Penyusunan, Perencanaan, Program Pelaporan dan Monitoring	Nilai LKJIP	67,06 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :	Rp. 20.000.000,-
		Jumlah Tersedianya Dokumen /	9 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	Rp. 20.000.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Laporan		Laporan Capaian Kinerja SKPD	
4	Meningkatkan Intensitas Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak",	Presentase Lembaga Layanan Perlindungan perempuan dan Anak (Pusat Layanan Terpadu)	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan :	Rp. 1.591.048.960,-
		Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan, Bimtek PUG melalui PPRG	25 OPD	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	Rp. 80.795.200,-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Layanan PPA/PATBM/F PABK	40 orang/ 100 Orang/ 25 Orang	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp. 281.398.260,-
		Peningkatan dalam Kabupaten Layak Anak	Madya (650) Poin	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)	Rp. 220.402.000,-
		Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	2.500 Orang	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	Rp. 197.367.000,-
		Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak di Kecamatan	33 FA	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	Rp. 134.248.000,-
		Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Datang ke Layanan P2TP2A	100%	Fasilitasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 676.838.500,-
		Persentase Perempuan Korban	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup	Rp 62.087.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Kekerasan yang di layani		dan Perlindungan Perempuan dan anak	
		Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	50 orang	Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Rp. 62.087.000,-
5	Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Cakupan Organisasi Perempuan yang aktif	100%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan :	Rp 296.892.750,-
		Jumlah Organisasi yang terbina dan te evaluasi	23 Organisasi	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 210.800.000,-
		Terlaksananya Expose Peningkatan Kreatifitas Ibu dalam Pembangunan	2 Kali	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan	Rp. 63.307.750,-
		Terbinanya dan terevaluasinya Desa Prima di Kecamatan	6 Kelompok	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	Rp. 22.000.000,-
6	Meningkatkan Akses Layanan Keluarga Berencana	Prosentase Pemakaian Kontrasespsi (CPR)KB	76,0%	Program Keluarga Berencana Kegiatan :	Rp. 3.641.358.834,-
		Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan KB Mobile	13 Kecamatan	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Rp. 110.577.199,-
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluh KB	460 Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana	Rp 1.017.500.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGE T	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Terlayani nya Masyarakat dalam hal ber KB	5 Kegiatan/ 362Kali Pertemuan	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Rp. 2.061.786.000,-
		Terdukung nya Kegiatan DAK BOKB dan DAK Fisik di Kecamatan	13 Kec	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	Rp. 81.497.435,-
		Jumlah Petugas Klinik KB dan Faskes yang Mengikuti Sosialisasi / Pelatihan	15 Orang	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr. Praktek dan Bidan Praktek	Rp. 130.234.200,-
		Jumlah Kampung KB	30 Kamp.	Advokasi dan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Kreatif Kamp. KB	Rp 239.764.000,-
7		Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja	100 %	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan :	Rp 111.024.000,-
		Terlaksananya Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi PIK R di Kabupaten Berau	6 Kelompo k	Pembinaan PIK / Remaja Mahasiswa	Rp. 111.024.000,-
8		Prosentase Keluarga Sejahtera	100 %	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan :	Rp. 138.679.000,-
		Jumlah Kelompok UPPKS yang terbina dan terevaluasi	13 Kelompo k	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	Rp. 82.143.500,-
		Jumlah BKB, BKL, yang terbentuk,	15 Kelompo	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu -	Rp 56.535.500,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Terbina dan Terevaluasi	k	PAUD	
Total Belanja Langsung (BL)					Rp. 7.220.467.344,-

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Berau dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sebagai tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Berau

Penetapan Kinerja merupakan tekat dan janji . Rencana Kerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintah Karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk di hasilkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor : 20 Tahun 2020 Tanggal 26 Desember tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 yang di jabarkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2020. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 22 Oktober Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah didukung dengan beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya di buat;ah Penetapan Kinerja melalui Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2020 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang akan di capai sebagai berikut :membuat penetapan kinerja Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Implementasi Pengarusutaman Gender	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	29,8 %

2	Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	100 %
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya (650) P0in
4	Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	76,03 %

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	Sasaran : I. Meningkatnya Implementasi Pengarus utamaan Gender II. Meningkatnya Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus III. Meningkatnya Implementasi Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)	
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak.	Rp. 1.591.048.960,-
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 62.087.960,-
3.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan,	Rp. 296.892.750,-
	Sasaran : IV. Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.359.376.300,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000,-

6.	Program Keluarga Berencana	Rp. 3.641.358.834,-
7.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 111.024.500,-
8.	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 138.679.000,-